

TESIS

**KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM
PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)**

*CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF DPD AUTHORITY IN THE INDONESIAN
REPRESENTATIVE SYSTEM (STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF DPD POST
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 92/PUU-X/2012)*



Oleh:

MUHAMAD AFIF KAFANDI

NIM. 2210622011

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

TESIS

**KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM
PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)**

*CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF DPD AUTHORITY IN THE INDONESIAN
REPRESENTATIVE SYSTEM (STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF DPD POST
CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 92/PUU-X/2012)*



Oleh:

MUHAMAD AFIF KAFANDI

NIM. 2210622011

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

HALAMAN JUDUL

**KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM PERWAKILAN
INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Pada Program
Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:
MUHAMAD AFIF KAFANDI
NIM. 2210622011

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMAD AFIF KAFANDI
NIM. 2210622011

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal, 5 Desember 2024

Menyetujui:

Pembimbing 1



Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP./NIDN./NIDK. 0311095701

Pembimbing 2



Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
NIP./NIDN./NIDK.0004087308



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971, Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id, e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD
DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (STUDI
PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)**

Disusun dan diajukan oleh
MUHAMAD AFIF KAFANDI
NIM. 2210622011

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 18 Desember 2024.
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H.
NIP./NIDN./NIDK. 0311095701

Pembimbing 2

Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.
NIP./NIDN./NIDK. 0004087308

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sunjuman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 18 Desember 2024

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Afif Kafandi

NIM : 2210622011



Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Februari 2025

ataa,



MUHAMAD AFIF KAFANDI
NIM. 2210622011

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : MUHAMAD AFIF KAFANDI
NIM : 2210622011
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul “KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)” adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta, 7 Februari 2025



ataaan,
6DAMX139236772
MUHAMAD AFIF KAFANDI
NIM. 2210622011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji dan syukur dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas segala ketentuan indah-Nya sehingga, tidak ada satupun hal yang terjadi tanpa lepas dari kehendak-Nya. *Alhamdulillah* atas rahmat, keberkahan, rasa sayang dan karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012)”** yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Tesis ini terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

- 1 Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
- 2 Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan.
- 3 Bapak Dr. Atik Winanti, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi Magister Hukum.
- 4 Keluarga Penulis terutama, Almarhum Bapak dan Mama yang tiada henti dalam mendoakan, memberikan semangat yang luar biasa dan selalu percaya dengan setiap keputusan-keputusan yang Penulis pilih dalam hidup sampai saat ini, bahkan saat Penulis meragukan hal tersebut. Penulis tentu

sangat mengetahui bahwa ucapan terima kasih tidak akan cukup membayar apapun kepada keduanya. Teruntuk, saudara-saudara Penulis terima kasih telah menjadi kakak yang selalu mendengarkan dan memberikan semangat.

- 5 Bapak Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I/Materi yang telah memberikan mutiara ilmu tak ternilai, menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan juga pengarahan kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 6 Bapak Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II/Teknis yang telah memberikan ilmu dan menyediakan waktu untuk membimbing Penulis dalam teknis penulisan tesis ini.
- 7 Bapak Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. selaku Penguji Pertama dan Bapak Mas Pungky Hendra Wijaya, Ph.D. selaku Penguji Kedua yang telah memberikan masukan kepada Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 8 Narasumber yang telah bersedia membantu Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 9 Rekan-rekan Mahasiswa/i Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta angkatan 2022 khususnya Fira Nurul Jannati yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan tesis ini.
- 10 Terakhir untuk diri Penulis sendiri, terima kasih atas segala yang telah kau capai sampai detik ini. Namun, perjuangan belum usai, masih banyak mimpi-mimpi yang harus terlaksana. Jangan terlalu mudah patah dalam mewujudkannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan tesis ini. Akhir kata, Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan, bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, 7 Februari 2025

MUHAMAD AFIF KAFANDI

ABSTRAK

MUHAMAD AFIF KAFANDI (2210622011). *KERANGKA KONSTITUSIONAL KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM PERWAKILAN INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN KEWENANGAN DPD PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012).* Dibimbing oleh Wicipto Setiadi sebagai Pemimbing Utama dan Ahmad Ahsin Thohari sebagai Pembimbing Pendamping.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah *Lembaga Perwakilan* sebagai perwujudan dari dijalankannya *sistem bikameral* (perwakilan dua kamar) di Indonesia. Akan tetapi sebagai kamar kedua *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* sangat terbatas dalam menjalankan perannya, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* memiliki kewenangan yang sangat lemah dibandingkan dengan DPR sehingga hal ini menyebabkan sistem perwakilan Indonesia dapat dikatakan menjalankan *soft bicameralism/bikameral lemah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengetahui, dan memahami Implementasi *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* dalam menjalankan kewenangannya *Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012*. Dalam mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode normatif mencakup penelitian norma-norma hukum baik itu *UUD 1945* maupun peraturan-peraturan di bawahnya, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti dan meneliti perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya. UU Nomor 17 Tahun 2014 maupun Tata Tertib DPR 2014 adalah bukti bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 telah diakomodir yang pada pokoknya mendesain proses *legislasi* menjadi model tripartit, yakni DPR, DPD, dan Presiden, yang setara sejak awal hingga akhir tahapan Pembicaraan Tingkat I. Pada Pembicaraan Tingkat II, *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* menyampaikan pendapatnya sebelum persetujuan atau pengesahan RUU menjadi UU antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna DPR namun *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* tidak terlibat pengesahan RUU menjadi UU. Terkait dengan Penguatan yang ideal untuk kewenangan *legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* bahwa perlu amandemen lanjutan yaitu amandemen kelima untuk mempertegas kewenangan dan fungsi *legislasi* yang kuat sekuat cita-citanya atau DPR harus berani berbagi tugas dengan *Dewan Perwakilan Daerah (DPD)* dalam *legislasi* demi menggapai sistem checks and balances yang sesungguhnya.

Kata Kunci: *Lembaga Perwakilan, Bikameral, Legislasi.*

ABSTRACT

MUHAMAD AFIF KAFANDI (2210622011). *CONSTITUTIONAL FRAMEWORK OF DPD AUTHORITY IN THE INDONESIAN REPRESENTATIVE SYSTEM (STUDY OF THE IMPLEMENTATION OF DPD POST CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 92/PUU-X/2012).* Supervised by Wicipto Setiadi as Main Supervisor and Ahmad Ahsin Thohari as Assistant Advisor.

The Regional Representative Council (DPD) is a representative institution that is a manifestation of the implementation of the *bicameral system* (two-chamber representation) in Indonesia. However, as the second chamber, *the Regional Representative Council (DPD)* is very limited in carrying out its role; *the Regional Representative Council (DPD)* has fragile authority compared to the DPR, so this causes the Indonesian representative system to be said to be implementing *soft bicameralism/weak bicameral*. This study aims to identify, know, and understand the Implementation of *the Regional Representative Council (DPD)* in exercising its authority *after the Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012*. In achieving this goal, this study uses a normative method, including research on legal norms, both the 1945 Constitution and regulations below it, with a *statute approach*, a *historical approach* that originates from laws and regulations related to the legal issues studied and examines the development of legal products based on the sequence of periodization or historical facts that underlie it. Law Number 17 of 2014 and the 2014 DPR Rules of Procedure are evidence that the Constitutional Court Decision Number 92/PUU-X/2012 has been accommodated, which, in essence designs the legislative process into a tripartite model, namely the DPR, DPD, and the President, who are equal from the beginning to the end of the Level I Discussion stage. In the Level II Discussion, *the Regional Representative Council (DPD)* conveys its opinion before the approval or ratification of the Bill into Law between the DPR and the President in a plenary meeting of the DPR. However, *the Regional Representative Council (DPD)* is separate from the ratification of the Bill into Law. Related to the ideal Strengthening of the legislative authority of *the Regional Representative Council (DPD)*, further amendments are needed, namely, the fifth amendment, to emphasize the authority and function of legislation that is as strong as its ideals or the DPR must dare to share tasks with *the Regional Representative Council (DPD)* in *legislation* in order to achieve a proper checks and balances system.

Keywords: *Representative Institution, Bicameral, Legislation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL	i
JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian	12
BAB II.....	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kajian Teoritis.....	18
1. Teori Konstitusi	19
2. Teori Lembaga Perwakilan.....	23
B. Kerangka Pikir.....	27
C. Definisi Operasional.....	34
BAB III	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Penelitian	36
B. Jenis Penelitian	36

C. Pendekatan Penelitian	36
D. Sumber dan Bahan Hukum	37
E. Metode Pengumpulan Data	38
F. Analisis Data	38
BAB IV	40
PEMBAHASAN	40
A. Implementasi Kewenangan DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.....	40
1. Dasar Argumentasi Yuridis penentuan Kewenangan DPD yang terumus dalam Pasal 22D UUD 1945	40
2. Implementasi Kewenangan DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012	61
B. Penguatan yang ideal untuk Kewenangan Legislasi DPD Dalam Sistem Perwakilan Indonesia	101
1. Optimalisasi Kewenangan Legislasi DPD Dalam Sistem Perwakilan Indonesia	101
2. Sinergitas dan Prospek DPD dalam Lembaga Perwakilan Indonesia yang akan datang.....	121
BAB V.....	139
PENUTUP.....	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA	142